

Melacak Daya Jalar Neoliberalisme Global, Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan dan Opsi Pengembangan Masyarakat Versi Gereja Katolik

Benediktus Denar*

Abstract

This paper aims to show controversy surrounding development. Therefore, there are two basic ideas that will be used by the author in this paper. First, the author rejects the theoretical framework and dominant paradigm in the study of development, power and poverty which places neoliberal capitalism as the main weapon used by the power to carry out development in order to reduce poverty. Second, the author will demonstrate an alternative development model which essentially places suffering as the main proposition of development. Here development is seen as a way of liberating people from suffering. Thus, the concept of liberating people from suffering is an inspiration used by the author to show Christian vision of development.

Key words: development, suffering, poverty, controversy, Christian vision, community development

Pengantar

Salah satu model atau ideologi yang cukup menguasai pilihan politik ekonomi dunia akhir-akhir ini adalah neoliberalisme. Ideologi ini mesti

*Dosen STIPAS St. Sirilus Ruteng

benar-benar dicermati sebab dalam kenyataannya neoliberalisme yang menopang pembangunan global memang telah berhasil mengiklankan impian-impian kemakmuran, namun gagal mengidentifikasi secara konkret impian dasarnya itu berhadapan dengan kerakusan yang menjadi “cacat bawaannya.” Ideologi pertumbuhan sebagai pengusung utama neoliberalisme pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi, namun dibarengi oleh parahnya kerusakan sosial, sekaligus degradasi lingkungan hidup.¹

Justru pada tempat inilah konsep seputar pembangunan penuh kontroversi. Sebab dalam kenyataan pembangunan tidak saja tidak membawa manfaat secara merata tetapi juga sering direduksi hanya sebagai medan terjadinya hegemoni kekuasaan politik dan pasar yang alih-alih mendatangkan kesejahteraan, tetapi dalam kenyataan justru menghasilkan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya. Di sinilah letak kontroversi atau ambiguitas pembangunan itu. Pembangunan menjadi sesuatu yang dikehendaki sekaligus ditentang, dirangkul sekaligus diwaspadai, dijalankan sekaligus dilawan.²

Ada dua gagasan dasar yang akan dipakai penulis dalam tulisan ini. *Pertama*, penulis menolak kerangka teoritis dan paradigma dominan dalam studi tentang pembangunan, kekuasaan dan kemiskinan yang menempatkan kapitalisme neoliberal sebagai senjata utama yang dipakai kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Sebab dalam kenyataannya, paradigma kapitalistik neoliberal dalam tata ekonomi politik pembangunan hanya mengukuhkan hegemoni peran pemodal dan semakin bebasnya mekanisme pasar serta terminimalisirnya peran negara. Akibatnya ketidakadilan sosial (kesenjangan) semakin meruncing, merusakkan lingkungan semakin masif, dan membuat budaya lokal semakin terdegradasi. *Kedua*, penulis akan menunjukkan sebuah model pembangunan

1 Max Regus, “Membongkar Aib Pembangunan”, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo, *Allah Menggugat Allah menyembuhkan*, (Mauwere: Ledalero, 2012), pp. 371-376.

2 Cypri Jehan Paju Dale, *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*, (Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013), pp. x-xi.

alternatif yang pada intinya ingin menempatkan penderitaan sebagai dalil utama pembangunan. Di sini pembangunan dilihat sebagai jalan pembebasan manusia dari penderitaan. Dengan pendasaran seperti ini, semua kebijakan, konsep dan strategi pembangunan akan dinilai secara etis apakah dia sanggup meniadakan atau membebaskan manusia dari penderitaan atau tidak. Dia menghendaki agar segala kebijakan dan upaya pengembangan masyarakat semestinya diarahkan untuk mengatasi, atau paling tidak sedapat mungkin mengurangi penderitaan manusia dalam semua bentuk dan dimensinya.³ Penempatan penderitaan sebagai dalil utama pembangunan ini akan dijadikan sebagai inspirasi dalam menunjukkan visi Kristiani dalam pengembangan masyarakat.

Daya Jalar Neoliberalisme

Konteks Historis dan Postulat Dasarnya

Secara historis, dapat dikatakan bahwa Adam Smith adalah salah satu pencetus utama neoliberalisme. Pada intinya Adam Smith menolak intervensi negara terhadap urusan ekonomi warga. Dia mengkritik rezim merkantilis Inggris pada saat itu yang memiliki prinsip bahwa kepentingan nasional harus diperjuangkan dengan cara memanfaatkan kekuatan negara untuk mendapatkan kekayaan sehingga dapat dicapai akumulasi kekuatan nasional. Rezim merkantilis meletakkan semua usaha ekonomi di bawah penguasaan serta dijalankan oleh negara dan memangkas inisiatif individual yang pada akhirnya tidak memanusiawikan warga negaranya. Senada dengan Smith, David Ricardo (1772-1823) mengemukakan pendapatnya tentang gagasan liberal, khususnya dalam perdagangan internasional. Ia menganjurkan perdagangan bebas antar-bangsa sebagai landasan hubungan ekonomi antar-negara. Perdagangan bebas dapat mempersatukan bangsa-bangsa seluruh dunia sebagai satu ikatan kepentingan dan interaksi.

³ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*, (Jakarta: Gramedia, 2006), p. 162.

Dengan ikatan semacam ini maka hubungan antar-negara menjadi efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini digambarkan sebagai parameter yang sederajat dengan kebebasan. Di sinilah letaknya postulat liberalisme itu. Postulat liberalisme dimulai dari perspektif filsafat liberal yang mengasumsikan manusia sebagai makhluk penuh damai dan memiliki kemauan bekerja sama, kompetitif namun konstruktif, dan langkah-langkahnya dibimbing oleh nalar, bukannya emosi. Pada sisi lain, negara digambarkan sebagai monster yang sangat menyeramkan. Kaum liberal klasik sangat membenci negara dan menganggap negara menyalahgunakan kekuasaan dan selalu bertindak sewenang-wenang. Mereka kemudian melakukan langkah-langkah reformasi untuk memperllemah kekuatan dan posisi negara terhadap warganya. Madzhab liberal menegaskan bahwa ketegangan antara negara dan pasar merupakan bentuk konflik antara penindasan dan kebebasan, kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik dan logika rasional. Anggapan ini berakar pada feodalisme raja-raja Eropa dan dogmatisme gereja yang sangat sewenang-wenang. Dengan berlandaskan pada pengalaman itu, maka ketika terjadi konflik antara negara dan pasar maka jelas, kaum liberal akan berpihak pada pasar serta dengan serta merta mencerca negara. Dalam praktik ekonomi politik, kaum liberal berpandangan bahwa negara cukup menjalankan sedikit urusan dimana hal itu memang tidak dapat dikerjakan oleh individu. Urusan itu misalnya mengenai keamanan, pembentukan sistem hukum, dan pembuatan mata uang.

Perjuangan kaum liberal mendapat justifikasi pasca-perang dunia II. Sebab perang dunia II mengubah paradigma politik ekonomi dunia. Secara singkat dapat digambarkan bahwa runtuhnya Uni Soviet dengan sistem politik dan ekonomi komunisnya membawa babak baru dalam sejarah dunia. Paling kentara, runtuhnya Soviet memberikan indikasi signifikan akan kegagalan paham komunisme dalam bersaing dengan paham kapitalisme, sekaligus sebagai pratanda kegagalan paham sovietik dan kekuasaan mutlak oleh suatu negara atau partai politik komunis. Maka hasilnya dunia seakan telah dimenangkan paham demokrasi di bidang politik dan sistem kapitalis di bidang ekonomi. Terhadap

fenomena ini oleh Francis Fukuyama, dalam artikelnya “*The End of History*” dan kemudian dalam bukunya “*The End of History and the Last Man*” menyatakan bahwa demokrasi liberal merupakan tujuan akhir dari evolusi ideologi umat manusia, sekaligus merupakan bentuk final dari pemerintahan manusia.⁴ Menurut Fukuyama, demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan telah memperoleh legitimasi kuat di seluruh dunia.⁵ Sampai di sini kita bisa mengerti bahwa kapitalisme global itu mendapat pendukung yang kokoh dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi (liberal).

Pengertian Neoliberalisme

Neoliberalisme yang dimaksudkan di sini dimengerti sebagai paham dan proyek besar untuk mengatur manusia dan tata masyarakat yang berisi dua lapis agenda.⁶ *Pertama*, neoliberalisme adalah paham dan agenda pengaturan manusia dan masyarakat yang didasarkan pada prioritas dimensi “manusia ekonomi” (*homo oeconomicus*) atas dimensi-dimensi lain hidup manusia dan masyarakat (manusia sebagai makhluk kultural, spiritual, politis, komunitas, dan sebagainya). *Kedua*, dalam kaitan dengan lapis agenda pertama, neoliberalisme juga dipahami sebagai dominasi sektor ekonomi finansial (*financial economy*) atas sektor ekonomi riil (*real economy*) dalam tata ekonomi-politik suatu masyarakat.

Kondisi neoliberal biasanya ditandai oleh dua ciri berikut ini.⁷ *Pertama*, semakin banyak bidang-bidang kehidupan pribadi dan masyarakat yang mengalami proses komodifikasi dan komersialisasi yang mendalam. Artinya, akses terhadap semakin banyak kebutuhan hidup (seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya) kian

4 Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Roulledge: 1992), p. 20.

5 Menguatnya kapitalisme yang melegalkan totalitas pasar secara amat kuat dimulai pada pemerintahan Margareth Thatcher di Inggris (1979) dan Ronald Reagen di AS (1980). Mereka menolak sistem ekonomi Keynesianisme yang cukup banyak dipakai tahun 1940-an sampai 1960-an. Bdk. Noreena Hertz, *Penjajahan Kapitalisme*, Terj. Dindin Solahudin (Bandung: Nuansa, 2011), pp. 28-38.

6 B. Herry-Priyono, “*Marginalisasi ala Neoliberal*”, dalam Jurnal BASIS, No. 05-06, Mei-Juni 2004, pp. 18-20.

7 *Ibid.*

ditentukan bukan oleh hak manusia untuk hidup, melainkan oleh kemampuan finansial pribadi dan daya beli (*purchasing power*). Itulah yang menjelaskan mengapa dalam kondisi ekonomi-politik neoliberal, gelombang privatisasi sangat kencang terjadi (meskipun tidak semua jenis privatisasi adalah bagian neoliberalisme). Oleh karena akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seperti kesehatan dan pendidikan semakin ditentukan oleh daya beli, tentu saja kaum miskin yang punya daya beli rendah juga semakin tidak punya akses pada kesehatan dan pendidikan yang layak. Itu juga berlaku dalam hal akses pada hukum.

Kedua, proses ekonomi ditandai oleh ketercerabutan (*disembeddedness*) aktivitas ekonomi dari konsern ekonomi 'orang-orang biasa' (seperti petani, buruh, nelayan, dan sebagainya). Artinya, transaksi saham, spekulasi uang, transaksi sekuritas, lindung-nilai (*hedge*), *derivatives*, dan semacamnya jauh lebih berkembang daripada proses ekonomi produktif seperti produksi sepatu, pakaian, beras, mebel, minyak goreng, jalan, jembatan, dan sebagainya. Orang-orang biasa yang dimaksudkan itu adalah penduduk yang hidup dengan bentuk-bentuk usaha 'ekonomi untuk sekedar bertahan hidup' (*survival economy*). Itu tentu berbeda dengan para penghuni ekonomi *haut monde* yang aktivitas ekonominya sama sekali bukan lagi untuk sekedar bertahan hidup, melainkan 'untuk akumulasi' (*accumulation economy*).⁸

Tesis-Tesis Dasar Kapitalisme

Dalam sistem ekonomi pasar liberal (*free market economy*), pasar dilihat memiliki kemampuannya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Totalitas pasar berlaku. Campur tangan pemerintah dalam mengurus lalu lintas perekonomian tidak diperlukan. Persaingan bebas berlaku dengan asumsi dasar bahwa mekanisme pasar bersifat sempurna dalam dirinya sendiri (*perfect competition system*). Setidaknya ada enam karakter dasar yang diasumsikan atau dimiliki oleh sistem kompetisi pasar bebas yang

⁸ Laporan dengan statistik sangat kaya mengenai makin tajamnya kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam perbandingan dengan negara-negara lain di Asia, lihat Asian Development Bank, *Key Indicators 2007: Inequality in Asia*, Metro Manila, 2007.

diyakini sempurna ini.⁹ *Pertama*, privatisasi aset (*private property*). Aset produktif dikuasai sepenuhnya atau sebagian besar oleh perorangan swasta. *Kedua*, terdapat jaminan kebebasan untuk menggunakan kekayaan perorangan untuk kegiatan usaha atau investasi dan kebebasan memilih pekerjaan (*Freedom of enterprise and choice*). *Ketiga*, motif orang perorangan dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi bersifat *self-interest*. *Keempat*, oleh karena motif perorangan yang bersifat *self interest* diakui, maka tidak terelakkan terjadinya persaingan yang bersifat terbuka yang mengendalikan motif kepentingan antarpribadi itu (*open competition*).

Kelima, untuk menjamin persaingan bebas, semua barang yang dibutuhkan tersedia dengan bebas, informasi bersifat terbuka untuk umum, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar (*market and prices*), yakni dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran (*equilibrium by demand-supply interaction*). *Keenam*, sebagai konsekuensi dari adanya totalitas pasar, intervensi pemerintah sedapat mungkin ditiadakan. Lalu lintas ekonomi sepenuhnya digerakkan oleh para pelaku pasar (*invisible hand*), yaitu oleh motif setiap orang dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing (*limited role of government*)

Cara Kerja Kapitalisme Neoliberal

Walaupun menimbulkan berbagai akibat yang riil, neoimperialisme kelihatan sulit ditolak. Sebab dia bisa hadir dengan ‘berbaju’ kedermawanan yang seolah-olah ingin membantu negara-negara di dunia ketiga. Faktanya memang mereka selalu membantu negara-negara dunia ketiga dalam proyek pembangunan tertentu. Namun di balik itu, ada maksud terselubung, terutama untuk melebarkan sayap neoimperialisme. Sekurang-kurangnya ada beberapa cara yang mereka sering praktikkan.¹⁰

Pertama, mereka memberikan paket bantuan sambil mengikat perjanjian-perjanjian yang menguntungkan mereka sendiri dan merugikan negara yang dibantu. *Kedua*, bantuan itu diberikan semata-

9 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), pp. 334-335.

10 *Ibid.*

mata agar aktivitas ekonomi tetap berjalan meski sangat terbatas yang tidak lain tujuannya agar potensi pemasaran barang-barang produksi dari negara maju tersebut tetap lancar dan terpelihara. *Ketiga*, dalam situasi demikian, terciptalah rasa ketergantungan dari negara-negara dunia ketiga yang dibantu sehingga tidak ada kesan pemaksaan dalam pengendaliannya. *Keempat*, dengan semuanya itu, negara-negara pemberi bantuan dari industri maju tersebut bisa dengan leluasa melaksanakan praktik imperialismenya.

Agen-Agen Kapitalisme-Liberal

Neoimperialisme membutuhkan agen atau pilar-pilar yang memungkinkan dia bisa bekerja secara sistematis di negara-negara dunia ketiga. Ada beberapa pilar utama yang patut disebutkan.¹¹ *Pertama*, pemerintah. Neoimperialisme (neoliberalisme) yang dialami negara-negara dunia ketiga salah satunya digerakkan oleh pemerintah, baik pemerintah negara imperialis (kapitalis) maupun pemerintah di negara dunia ketiga itu sendiri. Lembaga pemerintahan, dalam imperialisme berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pelindung (bahkan cenderung membuat deregulasi¹² dll) bagi unsur lainnya seperti kaum kapitalis dan segala sistem kolonialismenya. Dalam sistem neoimperialisme semua jajaran pemerintahan atau ketatanegaraan baik di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, dari pusat sampai daerah menjadi komponen utama

11 *Ibid.*, pp. 476-494.

12 Herry Priyono melihat bahwa deregulasi tidak dimaknai sebagai peniadaan atau pengurangan aturan. Deregulasi pada hakikatnya hanya sekadar pengalihan wewenang terhadap pengaturan tersebut. Jika regulasi umumnya (sebelum dilakukan deregulasi) dikeluarkan oleh pemerintah, maka deregulasi mengalihkan wewenang tersebut menjadi self-regulation. Self regulation bermakna pengaturan oleh diri sendiri. Diri di sini dapat berbentuk individu, lembaga, perusahaan nasional maupun multinasional, maupun oleh pemerintah daerah. Dengan konteks semacam ini, jika dulu regulasi hanya diciptakan oleh pihak yang berwenang dan ditujukan untuk semua pihak, sekarang karena self memegang kekuasaan membuat aturan, maka kemungkinan terbesar adalah aturan tersebut akan saling berbenturan. Dan tentunya aturan yang memiliki kekuatanlah yang akan menang. Kekuatan yang sangat menentukan sekarang ini adalah modal, dan hal itu menjadi modal utama MNCs. Dialah yang berhak memenangkan permainan regulasi ini. Lebih lengkap mengenai definisi deregulasi dan seluk beluknya, lihat. Herry B. Priyono, "Filsafat deregulasi" dalam *Kompas* 1 Juni 2005.

penggerak neoimperialisme-neoliberal. Di sinilah letak ambruknya institusi politik. Terkait hal ini, Peter L. Berger menulis;

Sebagai akibat dari persekutuan antara kekuatan ekonomi dan politik asing ini, bukan saja perekonomian tetapi juga kehidupan politik negara yang tergantung itu diporak-porandakan. Dalam hubungan ini, akan muncul persekutuan-persekutuan politis antara pihak asing dengan lapisan masyarakat setempat (biasanya suatu perpaduan antara kelas lama dari masa sebelum pembangunan dengan kelompok-kelompok borjuis nasional baru) yang melihat bisa memetik keuntungan dari kerja sama dengan pihak luar. ... Ditemukan suatu “kolonialisme intern” yang berpasangan dengan penguasaan kolonial dari luar negeri. Sebagaimana metropolis menghisap daerah jajahan, demikian pula kelas penjajah pribumi menghisap penduduk lainnya. Kesejajaran ini bukan sekadar kiasan, melainkan merupakan hakikat tata hubungan ekonomi dan politik antara kedua kelompok ini.¹³

Kedua, unsur kapitalis. Kaum kapitalis menjadi penegak utama neoimperialisme-neoliberal terhadap negara-negara dunia ketiga. Sasaran utama dari neoimperialisme bukan semata-mata dominasi politik, melainkan berusaha untuk merampas segala aspek kehidupan, terutama sumber-sumber ekonomi. Melalui target pada produktivitas industri dan permainan teknologi canggih, telah terjadi apa yang disebut sebagai neokolonialisme dan neokapitalisme.

Ketiga, lembaga-lembaga dunia seperti lembaga yang menangani kesehatan (WHO), lembaga yang menangani perdagangan (WTO), lembaga yang menangani keuangan atau perkreditan (IMF), lembaga yang menangani perburuhan (ILO) dan berbagai lembaga dunia lainnya sekarang ini lebih berperan sebagai perpanjangan tangan dari kapitalisme global atau neoimperialisme.¹⁴ Lembaga-lembaga ini sering dikendalikan oleh negara-negara maju yang mengusung ideologi kapitalisme. Tidak

13 Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia*, Terj. A. Rahman Tolleng, (Jakarta: LP3ES, 1982), pp. 49-50.

14 Sulastomo, *Cita-Cita Negara Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2014), p. 157.

heran apabila dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini lebih berperan mengembangkan dan melindungi kepentingan kapitalisme global yang menguntungkan negara-negara industri maju.

Keempat, lembaga non-pemerintah (NGO). *Non Government Organisation* (NGO) juga sering menjadi pilar dan sarana yang menopang imperialisme modern. Mereka masuk atas nama perjuangan kemanusiaan dan konservasi alam lingkungan, tetapi terdapat berbagai kepentingan tersembunyi lain yang sulit terdeteksi seperti mengamankan kepentingan kapitalisme global.

Kelima, media massa. Sejak perang dunia II, media massa memiliki peran penting menegakkan imperialisme. Media massa menjadi senjata utama dalam mempropagandakan ideologi kapitalisme global. Bahkan, dalam praktiknya, ada kerja sama antara media massa lokal dengan media massa dari negara industri maju untuk memuluskan langkah mereka. Di Indonesia misalnya, banyak media massa yang dikuasai modal asing dan bukan tidak mungkin banyak bekerja untuk kepentingan asing juga. Melalui iklan misalnya, media massa dapat mempengaruhi publik untuk mengikuti cara pikir dan gaya hidup yang mendukung kapitalisme global.

Bias-Bias Destruktif Kapitalisme-Neoliberal

Walaupun memunculkan optimisme akan kemajuan dan kemakmuran, namun sistem liberalisme-kapitalisme ternyata memunculkan berbagai keresahan yang sangat mendasar. *Pertama*, paham ini cenderung menginstrumentalisasi manusia. Manusia dihargai sejauh dia produktif secara ekonomis.¹⁵ Oleh karena itu, paham ini cenderung menolak kekhasan manusia berdasarkan kelompok sosial atau rasnya.¹⁶ *Kedua*, paham liberalisme juga membuat ambruk sistem politik sebuah negara. Sebab paham ini meyakini kesamaan antara manusia sebagai *homo politicus* dan manusia sebagai *homo economicus*. Jadi menurut paham ini, perjuangan politik mempunyai motif yang sama

15 Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat*, (Maumere: Ledalero, 2003), p. 62.

16 Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p. 157.

dengan perjuangan ekonomi.¹⁷ Keyakinan inilah yang merusak dunia politik, karena kebijakan politik diambil alih oleh para pemodal (*the invisible hand*). Hal ini dengan sangat bagus digambarkan oleh Noreena Hertz, Direktur Eksekutif *Center for International Business* Universitas Cambridge, sebagai berikut;

Inilah dunia pengambilalihan diam-diam, dunia pada saat fajar millennium menyinsing. Tangan-tangan pemerintah tampak terikat dan kita semakin hari semakin bergantung kepada korporasi. Bisnis sedang menduduki bangku sopir, korporasi menentukan aturan main, dan pemerintah telah menjadi sekadar wasit yang hanya menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Perusahaan-perusahaan yang mudah berpindah (*portable*) dan pemerintah bergerak sangat jauh untuk menarik atau memelihara mereka agar mereka tetap berada di wilayah mereka.¹⁸

Ketiga, paham liberalisme-kapitalisme sangat kuat memarginalisasi kaum miskin.¹⁹ Sebab sistem liberalisme cenderung berorientasi pada penumpukan kekayaan pada para pemodal besar dan sangat kuat menciptakan banyak orang miskin baru, termasuk mereka yang kalah dalam persaingan.

Keempat, arus neoliberalisme-kapitalisme global cukup kuat merusakkan lingkungan hidup. Pemutlakkan terhadap keuntungan dan akumulasi modal memang menimbulkan kemakmuran, namun kemakmuran itu banyak dicapai dengan merusakkan lingkungan hidup. Apalagi saat ini, ada ketakutan yang sangat mendasar berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup apabila suatu saat Asia dan Amerika Selatan mencapai kemakmuran seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini mengindikasikan bahwa pada taraf global, hampir dipastikan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa jika di seluruh dunia menggunakan kuantitas energi yang sama besar.²⁰

17 *Ibid.*

18 Noreena Hertz, *Op.Cit.*, p. 17.

19 Paulus Budi Kleden, *Loc.Cit.*

20 K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), p. 136.

Kelima, masalah yang paling rumit adalah semakin masifnya penyebarluasan model ekonomi dan pola/gaya hidup negara-negara kaya ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara miskin di dunia ketiga. Fenomen ini menimbulkan masalah yang amat krusial sebab penyebarluasan model ekonomi dan gaya hidup dari negara-negara kaya itu hampir pasti akan menyebabkan ambruknya tatanan bumi secara ekologis. Dunia akan segera musnah jika semua orang di seluruh dunia menikmati kemakmuran yang kurang lebih sama dengan orang-orang di negara-negara industri maju.

Penderitaan Sebagai Basis Etis Pembangunan

Penjernihan Konsep

Tema pembangunan sebagai pembebasan manusia dari penderitaan hendak menempatkan penderitaan sebagai etika dasar politik pembangunan. Dengan pendasaran seperti ini, semua kebijakan, konsep, dan strategi pembangunan akan dinilai secara etis apakah dia sanggup meniadakan atau membebaskan manusia dari penderitaan atau tidak. Dia menghendaki agar segala kebijakan dan upaya pengembangan masyarakat semestinya diarahkan untuk mengatasi, atau paling tidak, mengurangi sedapat mungkin penderitaan manusia dalam semua bentuk dan dimensinya.²¹

Konsep ini senada dengan konsep Peter L. Berger dalam bukunya *Piramida Korban* yang melihat bahwa tolok ukur segala kebijakan perkembangan masyarakat adalah menghindari atau paling tidak ikut memperhitungkan biaya-biaya manusiawi.²² Berger menyebut dua kriteria penderitaan, yakni tolok ukur sakit yang mengacu pada penderitaan fisik dan tolok ukur makna.²³ Penderitaan sebagai etika pembangunan menghendaki agar pembangunan hendaknya bertitik tolak dari segala

21 Johannes Muller, *op. cit.*, p. 162.

22 Johannes Muller, "Pembebasan Manusia Dari Penderitaan", dalam P. L. Berger, *op. cit.*, pp. xiv-xxi.

23 Gagasan seputar makna ini sangat luas dibahas B. L. Berger dalam bukunya *Piramida Korban*. Perhitungan makna yang dimaksudkannya termasuk mengenai tradisi-tradisi keagamaan. Bdk. *Ibid.*, pp. 168-1191.

yang dialami sebagai penderitaan fisik; seperti kelaparan, penyakit, kemelaratan, penyiwaan, penggusuran, diskriminasi, atau penindasan. Namun manusia juga menderita dan bahkan lebih menderita lagi jika misalnya hanya diperlakukan sebagai objek politik pembangunan, atau jika dipaksa tunduk pada pola sosio budaya asing, atau juga sebaliknya jika menjadi budak tradisi-tradisi pribumi yang tidak manusiawi.

Ciri Khas dan Orientasi Praktis Pendekatan Pembangunan Sebagai Pembebasan Manusia dari Penderitaan

Ada empat ciri khas dan orientasi praktis pendekatan pembangunan sebagai pembebasan manusia dari penderitaan. *Pertama*, menempatkan manusia yang konkret sebagai pusat. Etika pengembangan masyarakat yang menempatkan penderitaan sebagai basis etis dari pembangunan mengandung tuntutan agar menjadikan manusia yang konkret dengan segala penderitaannya sebagai pusat dari pembangunan. Sebab ada bahaya jika manusia ditempatkan dalam sebuah gambaran yang abstrak dan terlepas dari konteks budayanya. Maka menurut pendekatan ini, titik tolak dari kebijakan pembangunan haruslah manusia itu sendiri yang tidak pernah boleh diinstrumentalisasi demi tujuan lain, termasuk kepentingan ideologi tertentu.²⁴ Penjabaran dari pendekatan pembangunan yang berorientasi pada manusia bisa terlihat dari penjelasan Goulet. Menurutnya, pembangunan mesti menyentuh tiga elemen utama, yaitu kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*).²⁵

Kedua, mendahulukan orang yang menderita. Menempatkan penderitaan sebagai titik tolak kebijakan pembangunan mengandung tuntutan etis lain, yaitu kemendesakan pilihan untuk mendahulukan orang yang menderita. Di sini ada tuntutan agar segala usaha pembangunan

24 Johannes Muller, *op. cit.*, p. 168.

25 Moeljarto T., *Politik Pembangunan*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), pp. 9-10. Tujuan pembangunan versi Goulet ini hampir mirip dengan tujuan pembangunan yang dikehendaki oleh konstitusi negara Indonesia yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Bdk. Emi Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), p. 3.

mesti diarahkan sebagai bentuk solidaritas terhadap orang yang paling menderita, terutama orang-orang miskin. Solidaritas karena pengalaman penderitaan merupakan pengalaman universal dan memiliki kans untuk dihayati secara intersubjektif.²⁶ Rasa solider itu lahir karena semua manusia yakin bahwa pengalaman penderitaan merupakan pengalaman negatif yang harus dijauhkan atau dihindari. Keinginan seperti ini selalu bersifat spontan dan selalu mendahului segala penalaran dan tanggapan. Penderitaan dalam dirinya sendiri mengundang tuntutan untuk dihilangkan. Inilah dasar epistemis yang memungkinkan pembangunan bisa dijadikan jalan solidaritas terhadap kaum penderita.²⁷

Ketiga, menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi. Ciri khas dan orientasi lain dari pengembangan masyarakat yang menempatkan penderitaan sebagai titik tolak pembangunan adalah menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Menurut pendekatan ini, pembangunan selalu harus merupakan inisiatif dari bawah. Pilihan partisipasi “tidak bergantung pada keahlian teknis melainkan pada pertimbangan-pertimbangan moral.”²⁸ Sebab pembangunan selalu harus mengandaikan persetujuan moral, di samping adanya tujuan politik. Pembangunan selalu berarti “pertumbuhan yang baik dan modernisasi yang dikehendaki.”²⁹ Maka pembangunan yang berujung pangkal pada penderitaan diharapkan selalu berorientasi pada *self-sustaining capacity* masyarakat itu sendiri. Pembangunan dilihat sebagai medan partisipasi di mana prinsip subsidiaritas dan solidaritas menjadi tuntutan etis sekaligus sosiologis yang penting. Sebab ada keyakinan bahwa selama orang-orang miskin yang menjadi subjek pembangunan diremehkan dan tetap disingkirkan secara sosial dan politik, maka perubahan sebagai orientasi pembangunan pasti mereka tolak.³⁰

26 Johanes Muller, *op. cit.*, pp. 158-159.

27 Johanes Muller mengambil rumusan teori epistemologi Adorno yang disebut *negatio negationis* (peniadaan dari peniadaan), yaitu usaha mengatasi keadaan negatif yang menghilangkan apa yang seharusnya ada atau apa yang seharusnya menjadi hak. Bdk. *Ibid.*

28 P. L. Berger, *op. cit.*, p. 56.

29 *Ibid.*, p. 33.

30 Johanes Muller, *op. cit.*, pp. 256-259.

Keempat, pengejaran tujuan pembangunan tidak menyebabkan penderitaan. Pembangunan bertitik tolak pada penderitaan juga mendalilkan bahwa kebijakan pembangunan yang berusaha mengejar tujuannya tidak boleh menyebabkan penderitaan dalam bentuk lain. Oleh karena itulah pendekatan “menolak penderitaan” ini sering disebut sebagai suatu “etika realistik-utopis”. Sebab dia berusaha mencari utopia di tengah realitas konkret penderitaan, sekaligus membela realisme yang bertujuan mengurangi penderitaan. Dengan cara pandang dan cara kerja seperti ini, suatu bahaya berganda yang mengancam setiap etika dalam bentuk rumusan positif bisa dihindari. Di satu pihak, cita-cita yang diperjuangkan sekalipun teramat luhur tidak boleh dijadikan dalih untuk hanya mendung-dungungkannya, tanpa berbuat apa-apa. Sementara di pihak lain, realisme dalam merumuskan tujuan pembangunan begitu dimutlakan sehingga hanya bisa diwujudkan secara otoriter atau bahkan dengan paksaan fisik yang mau tidak mau akan melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Sebab jika ini yang terjadi justru tidak ada tempat lagi bagi manusia yang lemah.³¹

Manfaat Praktis Konsep Pembangunan Sebagai Pembebasan Manusia dari Penderitaan

Ada beberapa manfaat praktis dari pendekatan pembangunan berbasis penderitaan. *Pertama*, pendekatan ini memiliki relevansi praktis, bukan hanya permainan intelektual semata. Sebab penderitaan itu riil dan subjeknya jelas. *Kedua*, mayoritas orang secara intuitif mengenal hierarki penderitaan. Jadi semua orang bisa memahami apa itu penderitaan, tingkatan-tingkatan penderitaan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penderitaan itu. *Ketiga*, pendekatan ini juga berguna dalam menerangkan mengapa tindakan aktif tanpa kekerasan (*active non violence*) bisa menjadi strategi dan sarana perubahan yang efisien.³²

Keuntungan-keuntungan praktis di atas tidak menghilangkan karakter dasar pendekatan ini yang hanya bersifat normatif etis.

31 Johanes Muller, *op. cit.*, p. 170.

32 *Ibid.*, pp. 174-175.

Maksudnya, dia selalu hanya bisa menawarkan orientasi dasar dan karena itu memerlukan bantuan analisis sosiologis (sosio kemasyarakatan) yang seksama agar bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan politik. Analisis kemasyarakatan yang dimaksudkan tersebut harus menelaah dan membongkar sebab-sebab dan keterkaitan antara berbagai bidang/faktor, seperti politik, ekonomi, dan sosio budaya yang ada di balik penderitaan. Sebab analisis yang menyeluruh seperti itu dapat membantu mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar untuk kebijakan politik dan upaya praktis. Tanpa analisis demikian, rasa ikut menderita sebagai dorongan etis yang kuat hanya akan selalu berada dalam bahaya menguap, menjadi perasaan belas kasihan tanpa keterlibatan.

Visi Pembangunan Kristiani

Etika pembangunan yang pusatnya adalah penderitaan manusia tentu saja memiliki korelasi dengan teologi sebab masalah kemanusiaan, termasuk penderitaan menduduki tempat penting dalam refleksi teologis agama-agama. Konsep teologis seputar penderitaan hampir ditemukan dalam setiap agama termasuk Gereja Katolik. Bahkan ASG Katolik menempatkan martabat manusia terutama martabat dari mereka yang menderita pada tempat yang spesial. Dapat dikatakan bahwa ASG merupakan bentuk komitmen nyata dari Gereja untuk membela dan mengutamakan mereka yang menderita.

Kesimpulan ini bisa dibuktikan dari adanya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai salah satu tema dan prinsip sentral dalam ASG. ASG juga menuntut agar kesejahteraan umum harus mencakup semua anggota masyarakat tanpa kecuali. Keseluruhan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar ASG mengerucut pada salah satu tema kunci yakni pentingnya cinta kasih terhadap kaum miskin. Sedangkan terkait alam ciptaan, ASG menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Pada tempat inilah terdapat korelasi saling meneguhkan antara etika pengembangan masyarakat bertitik tolak pada penderitaan dengan ASG.

Mengutamakan atau Bertitik Tolak dari Kaum Miskin

Etika pembangunan yang bertitik tolak penderitaan dan amanat inti ASG memiliki salah satu implikasi fundamental yakni menjadikan orang miskin sebagai prioritas pilihan kebijakan pembangunan. Sebab mereka adalah orang yang paling menderita. Dengan demikian, jika pembangunan bertitik tolak dari faktum penderitaan, maka penderitaan orang miskin itulah yang mesti dicegah dan ditanggulangi. Bahkan dalam Nota pastoral KWI tahun 2004 lalu ditegaskan paradigma baru dalam Gereja yaitu Gereja adalah sahabat bagi semua. Bersahabat “dengan semua” pertama-tama berarti bahwa Gereja hadir untuk semua, tanpa ada yang dikecualikan. Namun demikian, eksistensi sebagai sahabat akan menjadi konkret ketika Gereja hadir di mana-mana dan melayani mereka yang menderita, yang berada dalam kesulitan, yang sedang mengalami jalan buntu dan dilanda bencana. Juga, apabila Gereja mengembangkan kearifan budaya sendiri dan ambil bagian dalam membangun keadilan sosial.

Gereja ingin menjadi sahabat bagi semua kalangan; mendengar dengan hati dan jiwa para penderita, korban, kaum tergusur dan mendoakan mereka; mengupayakan rasa kesenasiban dan keberpihakan kepada para penderita; mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membagi keprihatinan dan membangun nilai; menyediakan sarana atau kesempatan untuk temu persaudaraan yang mengatasi berbagai macam sekat sosial. Dalam kehadiran dan pelayanannya, Gereja ingin mengembangkan modal-modal sosial yang amat bernilai seperti: kekayaan budaya nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai keadilan sosial bagi seluruh bangsa, solidaritas, kesejahteraan umum, cinta damai - hal yang juga dapat digali dari kekayaan budaya setempat; kerelaan membantu saudara-saudari yang berkesusahan karena tertimpa bencana.³³

33 Bdk. Nota Pastoral KWI, *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa*, dikeluarkan di Jakarta, pada 11 November 2004. Bdk. Armada Riyanto, *Nota Meretas Jalan "Societas Dialogal"* Pembacaan Etis-Filosofis Nota Pastoral KWI, dalam Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, *Refleksi dan Evaluasi Nota Pastoral KWI Tahun 2003, 2004 dan 2006*, Spket-rum No. 4 Tahun XXXV, 2007, pp. 28-42.

Pilihan Gereja untuk mengutamakan kaum miskin tentu saja tidak berarti bahwa Gereja mengabaikan orang-orang kaya, karena Gereja ada untuk semua orang, apapun status sosialnya. Namun dalam situasi ketidakadilan dan penindasan, Gereja perlu mengambil sikap dengan mengutamakan kelompok-kelompok atau orang-orang yang paling dikorbankan dan yang tidak dapat membantu dirinya sendiri. Sebab mereka yang miskin dan tidak berdayalah yang terkena dampak paling berat dan karenanya meminta perhatian utama.

Tujuan utama dari pilihan mengutamakan kaum miskin adalah agar mereka kembali diberdayakan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini sangat menarik Surat Pastoral dari para Uskup Amerika Serikat yang berjudul *Economic Justice for All*, yang mengatakan bahwa:

Tujuan utama komitmen spesial kepada orang miskin ini adalah memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat. Mereka diberdayakan untuk mampu berbagi dalam dan menyumbang bagi kesejahteraan umum. Karena itu, *the option for the poor* bukanlah slogan permusuhan yang mengadu satu kelompok atau kelas dengan kelompok atau kelas lain. Tetapi prinsip tersebut menyatakan bahwa ketidakberdayaan kaum miskin melukai keseluruhan komunitas. Tingkat penderitaan mereka adalah ukuran sejauh mana kita telah menjadi sebuah komunitas sejati. Luka-luka itu hanya akan disembuhkan oleh solidaritas yang lebih besar dengan kaum miskin dan di antara kaum miskin sendiri.³⁴

Mengusahakan Pembangunan Berkelanjutan

Model pembangunan berkelanjutan juga merupakan salah satu implikasi penting dari model pembangunan bertitik tolak penderitaan berdasarkan ASG. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah bahwa usaha untuk *memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan*. Pembangunan

³⁴ Dikutip dari artikel Martino Rengkuan berjudul "Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja", dalam http://martinorengkuan.blogspot.com/2013/01/prinsip-prinsip-ajaran-sosial-gereja_6846.html, diakses pada 6 Maret 2015.

berkelanjutan penting karena dia memiliki cita-cita dan agenda dasar yang diarahkan agar terjadi sinkronisasi, pengintegrasian dan memberi perhatian serta bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Pada tempat inilah agenda pembangunan seharusnya mengikuti tiga prinsip pokok.

Pertama, prinsip demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar merupakan perwujudan kehendak bersama dan demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Prinsip demokrasi menolak tendensi pembangunan yang dilaksanakan hanya berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa.³⁵ Kedua, prinsip keadilan. Tuntutan dasar dari prinsip keadilan dalam pembangunan adalah agar semua orang dan semua kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, termasuk selanjutnya ikut juga dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Ketiga, prinsip ini menuntut agar agenda pembangunan dirancang dalam dimensi yang visioner dan berjangka panjang. Dengan

35 Taliziduhu Ndraha menunjukkan 8 akibat yang ditimbulkan apabila pembangunan terlalu didominasi oleh pemerintah (pola atas-bawah). Pertama, tugas-tugas dari atas dengan berbagai target dan kontrol yang ketat, serta datang bertubi-tubi justru membebani masyarakat sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan prakarsa dan swadyanya. Kedua, masyarakat akan terbiasa menunggu biaya dari atas. Ketiga, pembangunan berjalan terlampaui cepat dalam arti semua segi kehidupan ingin dijangkau secepat-cepatnya tanpa memperhitungkan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam memikul beban pembangunan yang semakin besar dan berat. Keempat, didorong oleh hasrat untuk mencapai keberhasilan secepat-cepatnya, pemerintah cenderung mengabaikan lembaga-lembaga sosial yang ada dan yang sebenarnya bisa memberi peranan positif dalam pembangunan desa. Kelima, pemerintah cenderung mengabaikan efek sampingan dari pembangunan dalam jangka panjang, yang biasanya dapat menghapuskan hasil yang telah dicapai pada jangka pendek. Keenam, pemerintah cenderung lebih memberi tekanan pada pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan secara cepat melalui tindakan-tindakan rasional, daripada pembangunan masyarakat desa (lokal) yang mempunyai sasaran jangka panjang dan tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan semata-mata rasional. Ketujuh, menurut PBB, metode pembangunan masyarakat lokal (desa) harus disesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial dan ekonomis setiap masyarakat. Tetapi di bawah sistem yang bersifat sentralis, penyesuaian tersebut sukar dilakukan. Kedelapan, dalam kondisi tertentu, masyarakat tidak segera menunjukkan tanggapan positif terhadap suatu hal yang baru. Hal ini bisa mengundang ketidaksabaran pemerintah. Bdk. Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), pp. 120-121.

demikian, dampak pembangunan baik positif maupun negatif dapat dideteksi dan dievaluasi dalam segala aspeknya. Untuk menunjang model pembangunan berkelanjutan, maka harus dipilih model pembangunan alternatif, yaitu pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Implikasi lanjutnya adalah mesti dipilih pola-pola pembangunan dan pola-pola konsumsi yang lebih hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat sumber daya alam.³⁶Prinsip keberlanjutan ini begitu penting karena pada akhirnya sangat menunjang prinsip keadilan antargenerasi. Sebab kedua prinsip ini pada dasarnya menuntut agar segala kebijakan pembangunan tidak hanya memperhatikan manfaat jangka pendek. Sebaliknya, kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan dan dibayar mahal dengan kerugian jangka panjang yang tidak sebanding dengan manfaat jangka pendek yang diperoleh. Kerugian jangka panjang yang dimaksudkan tidak saja yang bersifat ekonomis-material-fisik, tetapi juga bersifat non-material, mental, spiritual, kesehatan, sosial-budaya dan nilai serta mutu kehidupan manusia.

Solusi Metodologis Pengembangan Masyarakat

Pembangunan alternatif kontra neoliberalisme dan visi pengembangan masyarakat versi Gereja Kristiani bisa diterapkan secara lebih implikatif dengan salah satunya melalui kajian metodologis yang memadai. Salah satu metodologi yang bisa ditawarkan adalah melalui metode lingkaran pastoral. Banawiratma³⁷ memberikan uraian lebih rinci tentang Lingkaran Pastoral, yaitu ada empat tahap.

36 Dalam hal ini, sebagai contoh, Gereja bisa mengembangkan dan menawarkan gerakan ekopastoral. Ada beberapa gerakan yang bisa dibuat untuk mengembangkan ekopastoral. *Pertama*, menggali dan menemukan kembali praktik-praktik pertanian yang didasarkan pada kearifan lokal. *Kedua*, Gereja perlu mengajak umat dan masyarakat untuk menghormati, menghargai dan memuliakan sumber-sumber pangan (air, tanah, dan tanaman) sebagai bagian dari perwujudan hidup beriman dan beragama. Di sini pewartaan iman harus juga menyentuh usaha penyelamatan lingkungan hidup dari keserakahan manusia. *Ketiga*, membangun dan memperkuat kelompok-kelompok tani yang bersahabat dengan alam (pertanian organik/pertanian lestari). Kelompok-kelompok tani seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi model pertanian berwawasan lingkungan. Bdk. Benny Denar, "Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral" Opini dalam *Flores Pos*, Senin, 24 Februari 2014.

37 Lihat lebih lanjut J.B. Banawiratma dan J. Müller SJ, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Tahap pertama adalah mengenal dan mengalami langsung secara partisipatif dan terlibat atas masalah-masalah sosial yang nyata. Kedua, melakukan analisis sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial secara komprehensif dan menempatkan kasus-kasus yang dialami tersebut dalam konteks sosial politik kekinian. Tahap ketiga adalah melakukan refleksi teologi melalui pendekatan etis-sosial atas produk dari analisis di atas. Pada tahap inilah dipertemukan antara hasil analisis sebab-akibat dari gejala sosial tersebut dengan komitmen teologi atau Kitab Suci. Tahap keempat adalah tindakan atau realisasi dari tahap ketiga tersebut.

Penutup

Konsep seputar pembangunan penuh kontroversi. Sebab dalam kenyataan pembangunan tidak membawa manfaat secara merata bagi semua orang. Bagi kelompok tertentu pembangunan memang mendatangkan kesejahteraan dan kekayaan, namun bagi banyak kelompok lain pembangunan tidak hanya gagal mendatangkan kesejahteraan, tetapi justru mendatangkan malapetaka karena dapat mengancam keberlanjutan kehidupan, menimbulkan kerusakan alam, sekaligus menyebabkan destruksi budaya. Pembangunan pada akhirnya hanya melahirkan dominasi, pencaplokkan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuknya. Di sinilah letak kontroversi atau ambiguitas pembangunan itu. Pembangunan menjadi sesuatu yang dikehendaki sekaligus ditentang, dirangkul sekaligus diwaspadai, dijalankan sekaligus dilawan.

Ambiguitas pembangunan nampak jelas dalam pilihan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan neoliberalisme menjadi senjata utamanya. Sebab dalam kenyataan neoliberalisme telah melahirkan bias-bias destruktif yang mengancam martabat manusia, merusakkan lingkungan hidup dan merusakkan identitas budaya. Oleh karena itu, konsep pembangunan sebagai jalan pembebasan manusia dari penderitaan patut menjadi alternatif. Konsep ini sesuai dengan opsi dasar pengembangan masyarakat menurut Gereja. Maka seturut konsep etis

dan opsi Gereja tersebut, maka arah pengembangan masyarakat mesti mengarah kepada semakin kuatnya perhatian kepada orang miskin, sekaligus semakin dikembangkannya model pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Armada Riyanto. Nota Meretas Jalan "Societas Dialogal" Pembacaan Etis-Filosofis Nota Pastoral KWI", dalam *Spektrum* No. 4 Tahun XXXV, 2007.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Banawiratma, J.B. dan J. Müller SJ. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 1993 .
- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia*. Terj. A. Rahman Tolleng. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Dale, Cypri Jehan Paju. *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013.
- Denar, Benny. "Pertobatan Ekologis dan Gerakan Ekopastoral". Opini dalam *Flores Pos*, Senin 24 Februari 2014.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Routledge, 1992.
- Hertz, Noreena. *Penjajahan Kapitalisme*. Terj. Dindin Solahudin. Bandung: Nuansa, 2011.
- Kleden, Paulus Budi. *Teologi Terlibat*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Regus, Max. "Membongkar Aib Pembangunan", dalam Paul Budi Kleden, dkk. *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*. Maumere: Ledalero, 2012.

- Rengkuan, Martino. Link: http://martinorengkuan.blogspot.com/2013/01/prinsip-prinsip-ajaran-sosial-gereja_6846.html, diakses pada 6 Desember 2019.
- Muller, Johannes. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nota Pastoral KWI. “Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa”. Dikeluarkan di Jakarta pada 11 November 2004.
- Priyono, Herry B. “Filsafat Deregulasi”. Opini dalam *Kompas*, Rabu 01 Juni 2005.
- Priyono, B. Herry. “Marginalisasi ala Neoliberal”. dalam *Jurnal BASIS*, No. 05-06, Mei-Juni 2004
- T., Moeljarto. *Politik Pembangunan*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sulastomo. *Cita-Cita Negara Pancasila*. Jakarta: Kompas, 2014.